

# praksa

*Membangun Pikiran Kritis dan Memperkuat P Prakerja Masyarakat*

warta dwi-bulanan ksppm  
no.127/Juli-Desember/XXXIX/2024  
ISSN: 021-1863

## **MENOLAK KALAH DARI PENGUASA PONGAH**

**SIASAT RAKYAT MELAWAN  
REZIM EKSTRAKTIF**



## Salam dari Sopo...,

PARA pembaca Prakarsa di mana pun berada, Prakarsa edisi Juli - Desember 2024 kini hadir di tengah pembaca. Pada edisi ini Prakarsa menyajikan berbagai informasi seputar implementasi Pembangunan di Kawasan Danau Toba. Ada banyak informasi dan cerita menarik yang penting dibaca. Tentunya, informasi menyangkut kegiatan di kelompok dampingan dari desa-desa dampingan, juga tetap disajikan pada edisi ini. Akhir kata, semoga berbagai informasi yang disajikan dapat menambah pengetahuan, kesadaran, kekritisian dan wawasan pembaca.

## Daftar Isi

### Editorial:

- Pengantar Penyuting ..... i

### Studi & Advokasi:

- *Sala Mandasor Segi Luhutan*: Food Estate, Kuasa Modal, dan Penciptaan Konflik ..... 1

- Pemuda dan Keharusan untuk Berserikat ..... 7

- Masyarakat Adat Pandumaan-Sipitu Huta: Perjuangan Kami Belum Selesai ..... 9

**Berita Sopo:** ..... 17

### Pengorganisasian:

- Mata Guru, Roha Sisean Orientasi KT Saoloan ke KT Tani Mulia tentang konsep Pertanian Selaras Alam ..... 20

- Catatan Selama Mengikuti Pelatihan *Critical Agrarian Studies Of Indonesia (CASI)* di Bandung ..... 23

*prakarsa*

Diterbitkan oleh  
Perhimpunan Kelompok Studi dan  
Pengembangan Prakarsa  
Masyarakat (KSPPM)

Alamat Redaksi:  
Girsang I, Sipanganbolon  
Kec. Girsang Sipanganbolon  
Parapat - 21174  
Telp. 62-625-42393  
Fax. 62-625-42393

E-mail:  
ksppm@yahoo.com

website:  
www.ksppm.org

Media Sosial  
Fb/Ig: @ksppm.parapat

ISSN:  
0215-1863

### Redaksi:

**Penanggung Jawab:** Delima Silalahi, MA.; **Pemimpin Redaksi:** Delima Silalahi, MA.;  
**Editor:** Delima Silalahi, MA., Dion Pardede SH.; **Dewan Redaksi:** Rocky Pasaribu MH.,  
Angela C. Y. Manihuruk, M.Si., Iwan Bernando Samosir S.Sos., Lambok Lumban Gaol SH.,  
Sandres Siahaan, SE., Leorana Sihotang, S.Sos., Saor Abadi Aritonang S.IP., Romian Siagian,  
S.Pd., Dion Pardede SH., Adinda Azzahra Sembiring S.AP., Bona Tua Purba S. AB., Josua Sihite  
S.Pd., Darmawijaya Naibaho SP., Yacob Napitupulu SH., Vianney Hutaauruk S.E., Panca Sitorus.;  
**Staf Keuangan:** Harry Nainggolan, S.E.; **Administrasi/Distributor:** Gratia Sialagan, Benni  
Pasaribu, SE., Bobby Fisher Simamora, Irwan Pakpahan.

Untuk memperkaya isi Prakarsa ini redaksi menerima sumbangan pikiran, artikel, berita, ulasan dari khalayak pembaca. Pandangan dan pendapat penulis yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat atau pandangan redaksi. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengurangi makna.

# Pengantar Penyunting

Dion Pardede

**E**disi ini hadir untuk memelihara harapan sekaligus memantik diskusi terus-menerus di kalangan kota terdidik, dan masyarakat pedesaan sendiri. Supaya dalam Gerakan Sosial Pedesaan, kita sadar betul bahwa tiada hal lain yang bisa kita lakukan selain mengorganisir diri. Pekerja tani, buruh perkotaan, akademisi progresif harus memiliki kaitan kesadaran yang mumpuni.

Bentuknya bisa beragam, beberapa di antaranya muncul dalam tulisan karya para pengorganisir KSPPM dan juga kaum tani itu sendiri. Terlihat kisah perjuangan tenurial oleh masyarakat adat, telaah kritis pengorganisir tentang kerja pengorganisasiannya, hingga praktik alternatif pertanian yang menantang sistem kapitalistik yang mengarusutama. Demikianlah seharusnya kita terorganisasi. Kolaborasi rakyat banyak dengan kaum terdidik akan selalu ampuh dalam perebutan negara sebagai situs perjuangan.

'Penguasa pongah' dalam edisi kali ini adalah oligark yang melanggengkan kelindan akumulasi kapital dan penyelenggaraan negara. Praktik-praktik dan pendidikan rakyat dalam edisi ini adalah manifestasi dari pikiran yang memberontak. Bahwa negara harus direbut dari para penguasa pongah itu.

Semoga edisi ini memantik kesadaran kelas kita semua. Sudah terlalu lama kita larut dalam protes seremonial yang tak membumi. Saatnya gerakan sosial pedesaan bertumpu pada perjuangan kelas.

**Merdeka!**

**Dion Pardede,**

Penyunting

# Sala Mandasor Sega Luhutan: Food Estate, Kuasa Modal, dan Penciptaan Konflik

Leorana Sihotang

Isu proyek food estate yang awalnya menjadi perhatian nasional tenggelam di tengah persiapan Pilkada dan dinamika politik lainnya. Sementara itu sampai saat ini masyarakat adat Ria-ria masih terus berjuang untuk kejelasan pengakuan atas tanah adat mereka yang tidak terlepas dari klaim negara. Jika pada tahun 1970-an para ibu di Desa Ria-ria harus berjuang mempertahankan tanah adatnya dari klaim kawasan hutan negara atas nama reboisasi dan penghijauan, maka sekarang masyarakat adat juga harus berjuang dari kepungan proyek raksasa Food estate.

Food Estate awalnya ingin menjawab krisis pangan secara global, dan menjadi awal mula berbagai pembangunan infrastruktur – sarana dan prasarana – pertanian di lokus proyek ini, yaitu Ria-ria. Pembangunan infrastruktur dan sarana pertanian yang sudah lama dinantikan masyarakat dan ditampung di berbagai musyawarah mulai desa hingga kabupaten justru baru terjawab lewat proyek PSN tersebut.

Sayangnya, petani tidak terlibat mendiskusikan rangkaian proyek food estate ini mulai dari penetapan lokasi proyek, peran masyarakat, stakeholder yang terlibat, pengawasan kerjasama dengan pihak investor dll. Hingga semua berlangsung secara *top-down* berdasarkan pikiran pemerintah.

Penetapan lokasi food estate dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Padahal, secara *de facto* lahan tersebut merupakan tanah adat Masyarakat Ria-ria dengan struktur kepemilikan tanah yang bersifat *public-private*.



Lalu pemerintah melakukan sertifikasi tanah yang kemudian secara keliru menyebutnya sebagai bagian redistribusi tanah – bahkan bagian dari reforma agraria.

Setelah proyek food estate di Ria-ria dengan luasan 215 Ha berlangsung kurang lebih empat tahun, ia berekspansi ke areal Desa Parsingguran I.

“*Sala mandasor sega luhutan*, seperti itulah proyek food estate ini sekarang” ungkap Tua Siregar, warga senior Desa Ria-ria

Ungkapan batak tersebut bermakna bahwa kesalahan membangun pondasi sama artinya dengan rusaknya bangunan/pekerjaan secara keseluruhan.

Sama halnya dengan proyek yang telah berdiri di atas konflik klaim kawasan hutan negara dan pengabaian negara atas pengakuan tanah adat yang sudah diberikan kepada masyarakat adat Ria-ria pada tahun 1979.

## Serangkaian Proses Akuisisi Tanah Oleh Negara

Pada 1970-an, Indonesia memulai kebijakan reboisasi dan penghijauan dilakukan secara masif sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengatasi degradasi lingkungan. Program-program yang dikelola oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk memperbaiki lahan kritis, mencegah erosi, dan meningkatkan tutupan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas ilegal dan pertanian yang tidak terkendali.

Kebijakan reboisasi dan penghijauan ini tidak hanya bertujuan lingkungan, tetapi juga menjadi alat negara untuk mengklaim kembali kawasan yang secara historis telah dikelola oleh masyarakat adat. Negara seringkali menganggap tanah-tanah ini sebagai 'lahan kosong' atau 'tanah negara' yang bebas dari klaim, meskipun masyarakat adat telah mendiami dan mengelola tanah tersebut selama beberapa generasi.

Dalam praktiknya, kebijakan ini mengakibatkan pengambilalihan lahan yang sebelumnya dikuasai oleh petani dan masyarakat adat. Negara memanfaatkan alasan konservasi untuk mengambil alih tanah-tanah adat tersebut, yang kemudian dijadikan kawasan hutan negara. Proses ini sering kali dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak, dan tanpa kompensasi yang adil. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan akses ke tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi dasar kehidupan mereka.

Wilayah adat Ria-ria menjadi salah satu fokus program reboisasi dan penghijauan tahun 1963 dan menjadi cikal bakal malapetaka di tanah adat tersebut. Ternyata penghijauan yang dimaksud adalah penanaman pohon pinus yang menjalar hingga ke areal pertanian kopi, kemenyan bahkan mendekati areal pemukiman. Masyarakat yang merasa terancam dengan

pelaksanaan program ini kemudian melakukan perlawanan dengan mencabuti pinus yang ditanam. Sayangnya masyarakat justru mengalami kriminalisasi dan ancaman dengan menggunakan senjata dari aparat.

Berbagai perlawanan dilakukan oleh warga Ria-ria khususnya pihak Ibu yang ditinggalkan para suami karena menghindari kekerasan dari militer, seperti merebut senjata aparat, melakukan aksi demonstrasi dengan berjalan kaki ke kantor pemerintah, dan membakar kantor camat. Serangkaian aksi tersebut tentu menjadi bagian dari pertahanan diri dari berbagai kekerasan yang dilakukan oleh pemberontakan dan militer pada saat itu.

“tanah adat kami tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian kami tetapi merupakan harga diri kami hasil dari perjuangan para orang tua kami, karena ada darah dan nyawa yang menjadi korban dan kemenangan mereka ditandai lewat SK Pengakuan tanah adat kami” ujar Mardianton Lumban Gaol, Ketua Lembaga Adat Desa Ria-ria

SK yang dimaksud adalah SK:138/KPTS/1979 yang mana seluruh areal Sigende, Parandalimanan, Parhutaan, Adian Padang, dan Sipiuan tetap menjadi wilayah adat Si Ria-Ria dan sesuai dengan peta yang dikeluarkan Kepala Agraria Tapanuli Utara.

Masyarakat yang tidak tahu menahu terkait dengan proses birokrasi yang ada, mengira penyerahan SK adalah puncak dari kemenangan dan kedaulatan mereka atas tanah tersebut. Namun, pemerintah tidak melakukan upaya tindak lanjut seperti penata batasan dan pengukuran lahan sesuai dengan peta yang terlampir pada SK tersebut. hingga pada 2020, pemerintah lewat pihak kehutanan lalu menerbitkan izin Kelompok Tani Hutan (KTH) di areal Sigende kepada masyarakat Desa Parsingguran I, tetangga Ria-ria.

Kebijakan ini telah menciptakan perselisihan di antara kedua desa. Namun, belum ada penyelesaian sengketa dengan kedua desa ini, pemerintah malah kembali merancang proyek food estate di atas tanah tersebut. Pola yang sama dari pengambilalihan tanah kembali terlihat. Tanah-tanah adat yang telah diambil alih melalui kebijakan reboisasi dan penghijauan pada dekade sebelumnya, kini menjadi target pengembangan proyek food estate. Pemerintah menggunakan dalih pembangunan nasional dan ketahanan pangan untuk mengintensifkan akuisisi lahan di wilayah-wilayah adat.

Proyek food estate di berbagai daerah, termasuk di Desa Ria-ria, memperlihatkan bahwa akuisisi tanah adat oleh negara tidak berhenti pada program konservasi lingkungan, tetapi terus berlanjut dengan proyek-proyek pembangunan skala besar. Pemerintah terus memperluas kontrol atas lahan, sering kali dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat yang telah lama tinggal dan bergantung pada tanah-tanah tersebut.

### **Hak Dasar yang dilanggar oleh Pemerintah dalam Percepatan Proyek**

Secara nasional ada beberapa peraturan yang mengakui keberadaan masyarakat dan tanah adat yang memiliki hak istimewa sebagai warga negara:

- Dalam konstelasi hukum Indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa yang dimiliki masyarakat hukum adat.

- Mengenai penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat, negara juga telah mengeluarkan PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu.
- Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengakui eksistensi masyarakat adat sepanjang telah dikukuhkan di dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun, dalam banyak hal, masyarakat adat mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengakuan dalam bentuk perda.

Apabila negara melakukan pelanggaran terhadap hak dasar tersebut merupakan bagian dari pelanggaran HAM serius.

Selain itu FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*) menjadi salah satu peraturan internasional yang mengatur keberadaan masyarakat adat, yang menegaskan bahwa pembangunan, aktivitas, program, atau sebuah kebijakan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat yang tanah dan lingkungannya terdampak.

Tanah adat yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat Ria-ria diambil tanpa persetujuan mereka, melanggar hak yang diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan lainnya.

**Pengabaian Partisipasi Masyarakat:** Pemerintah tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi mereka.

Pengabaian hak ini menghasilkan banyak kerugian.

Pertama, munculnya konflik horizontal/disharmonisasi yang merusak tatanan sosial dan kekerabatan masyarakat kedua desa ini – Ria-ria dan Parsingguran I.

“Mereka ada sanak saudara kami, kawin mawin terjadi diantara anggota desa ini, dalam beberapa acara adat harus saling menghadiri bukan sebagai tamu tetapi posisi yang penting dalam kekerabatan dan adat” kata Elisabet Siboro, perempuan adat Ria-ria.

Hal lain yang mempertajam konflik adalah individualisasi hak atas tanah yang tidak tepat. Proyek *Food Estate* mengubah struktur kepemilikan tanah yang diatur secara adat menjadi menjadi hak milik individu lewat sertifikasi. Tanah yang memiliki nilai lebih dan menjadi komoditas ini membuat masyarakat menuju arena perebutan alas hak untuk menguasai tanah tersebut secara individu.



Gambar: Lembaga Adat Ria-ria menyurati pihak Investor/Offtaker di Food Estate Ria-ria

Konflik horizontal antara masyarakat adat Ria-ria dengan masyarakat Parsingguran I tidak terhindarkan, dan membawa masyarakat Ria-ria pada proses pidana.



Gambar: Aksi Demonstrasi Masyarakat Adat di kantor Bupati dan Polres Humbang Hasundutan

### Apa yang dilakukan Masyarakat Adat?

Aksi demonstrasi pada Rabu, 28 Agustus 2024 menjadi puncak dari keputusan, kekecewaan pada pemerintah kabupaten yang selama ini dipercayai oleh masyarakat untuk menegaskan status pengakuan tanah adat Ria-ria. Itu sebagai salah satu cara untuk meredam konflik horizontal dengan masyarakat desa Parsingguran I. Masyarakat Ria-ria menuntut pihak kepolisian untuk mengawal penghentian aktivitas di Sigende yang menjadi lokasi sengketa dan menghentikan proses pidana terhadap anggota Masyarakat Adat Ria-ria hingga ada penyelesaian sengketa Tanah Adat Desa Ria-Ria.

Selain itu, masyarakat Ria-ria menuntut pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah Pengakuan &

Perlindungan Masyarakat adat di Humbang Hasundutan. Perda ini seharusnya menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi tumpang tindih klaim hak atas tanah. Namun, bupati malah tidak muncul, sehingga masyarakat menuntut pengembalian SK asli yang sempat diserahkan oleh Lembaga adat Ria-ria. Itu dilakukan dengan harapan pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah mereka. Akan tetapi, justru penghinaan yang diterima oleh masyarakat adat Ria-ria. Untuk itu masyarakat ingin menyelesaikan pengakuan tersebut langsung ke pihak kementerian dengan berdasarkan alas hak SK yang asli.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Ria-ria seperti sia sia karena tidak ada kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sejak aksi yang tidak mendapatkan hasil tersebut masyarakat kemudian menyurati investor/*offtaker* yang terlibat dalam program food estate, untuk menghentikan aktivitas mereka hingga ada penyelesaian sengketa dari pemerintah.

Tindakan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Ria-ria tidak hanya



Gambar: Lembaga Adat Ria-ria menyurati pihak Investor/Offtaker di Food Estate Ria-ria



Gambar: Aksi Demonstrasi Masyarakat Adat di kantor Bupati dan Polres Humbang Hasundutan

menghadapi negara, tetapi juga harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang terlibat dalam proyek tersebut. Mereka sadar bahwa investor memiliki peran kunci dalam melanjutkan atau menghentikan proyek, dan dengan menyurati mereka, masyarakat berusaha menekan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah adat mereka, keesokan harinya, pemuda adat di desa tersebut serentak membuat pos dan portal di pintu masuk desa untuk membatasi aktivitas pihak luar. Langkah ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Ria-ria mengambil inisiatif untuk mempertahankan tanah mereka secara langsung, sambil menunggu tindakan nyata dari pemerintah. Portal ini bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk menjaga kedaulatan atas tanah adat yang mereka klaim dan lindungi.

Tindakan masyarakat adat Ria-ria ini mencerminkan tekad kuat untuk melindungi hak-hak mereka, meskipun menghadapi





*Gambar: Pemuda Adat memasang Portal di Jalan pintu masuk Desa Ria-ria*

tekanan dari negara dan pemodal. Ini juga menggarisbawahi ketidakpercayaan yang semakin mendalam terhadap pemerintah, yang dianggap gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.

Proyek food estate di Ria-ria adalah persoalan ekonomi-politik yang mendalam, di mana kepentingan modal dan negara berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat. Proses akuisisi tanah, pengabaian

partisipasi, dan dampak sosial yang dihasilkan menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak inklusif dapat membawa dampak negatif yang luas, bukan hanya bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi tatanan sosial dan lingkungan secara keseluruhan.

**Leorana Sihotang** adalah staf di Divisi Studi & Advokasi KSPPM

# Pemuda dan Keharusan untuk Berserikat

Romian Siagian



Foto dr Soetomo: Tangkapan layar web [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id)

**S**ejjarah gerakan transformasi sosial khususnya di Indonesia didominasi oleh pemuda. Organisasi kepemudaan telah diperkenalkan sejak awal abad ke-20 dengan didirikannya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Sebagai

organisasi pemuda pertama, Budi Utomo dianggap sebagai awal dari lahirnya pergerakan nasional. Hingga hari ini, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional untuk memperingati semangat pemuda menumbuhkan prakarsa nasional.

Pasca Budi Utomo, lahir pula berbagai organisasi kepemudaan seperti Sarekat Islam (SI), Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, ISDV (cikal bakal Partai Komunis Indonesia), Jong Sumatra Bond, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi pemuda ini didirikan dengan semangat dan tujuan yang beragam, namun yang paling menonjol adalah semangat untuk merdeka dari koloni Belanda, semangat nasionalisme, keagamaan, budaya dan pendidikan. Gerakan-gerakan yang dilakukan pemuda telah berhasil memelopori Sumpah Pemuda, menggagas kemerdekaan Indonesia, dan menumbangkan rezim Orde Baru.

Dalam trend politik elektoral belakangan ini, pemuda kerap dijadikan objek agenda politik. Fenomena representasi politik anak muda dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Narasi pentingnya keterwakilan pemuda dalam politik terus digaungkan tanpa memperhatikan sumberdaya yang dimiliki pemuda yang jauh dari akses, dan di waktu yang sama, pemuda-pemuda desa tidak bekerja, kehilangan hak atas tanah, menjadi korban dari konflik struktural, bahkan pemuda masuk ke dalam kelompok rentan di desa.

Paradigma pembangunan yang bertumpu pada investasi saat ini telah menciptakan banyak konflik di wilayah adat tempat para pemuda dilahirkan dan dibesarkan. Praktik perampasan tanah dan pengrusakan sumberdaya alam disaksikan sejak pemuda masih berumur belia. Beberapa dari mereka tergiur untuk menjebloskan diri menjadi buruh perusahaan yang merusak kampungnya, sisanya adalah pemuda yang menyimpan kemarahan sebab merasa harga dirinya diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan perenggut identitasnya.

Kehadiran industri di perkampungan bahkan sampai ke pintu belakang dapur rumah, membuat pemuda tani dan pemuda adat di desa tidak memiliki akses atas tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah antara pengusaha dan masyarakat adat membuat pemuda semakin terpingirkan. Kondisi tersebut membuat beberapa pemuda memilih mengadu nasib ke perkotaan dan menjadi buruh pabrik, sementara sisanya menetap di kampung untuk bertani dan ikut dalam arak-arakan memperjuangkan hak atas wilayah adat.



Perjuangan mempertahankan hak atas wilayah adat di komunitas-komunitas masyarakat adat di Kawasan Danau Toba bukanlah perjuangan para tetua kampung sahaja, kerap pemuda mengambil peran sentral di dalamnya seperti pemuda di Komunitas Nagasaribu Onan Harbangan, Pandumaan-Sipituhuta, Komunitas Pomparan Ompu Bolus Simanjuntak, Kelompok Pemuda Tani Martabe dan lain sebagainya. Para tetua kampung pun menyadari kekuatan yang dimiliki oleh pemuda. Kekuatan dalam hal ini bukan hanya menyoal tenaga melainkan ketajaman berpikir dan mobilitas yang tinggi.

Hasil berbincang dengan beberapa pemuda di beberapa komunitas, terlihat beberapa persoalan yang dialami, seperti menerima stigma negatif karena menetap di kampung di saat pemuda lainnya bekerja di perkotaan, belum ada kepastian hak atas tanah, hasil kerja yang dikontrol oleh orang tua, belum lagi menyoal hasil pertanian yang dihabisi babi hutan dan menurunnya kuantitas dan kualitas getah kemenyan.

Atas kegelisahan yang dialami, pada 2023, digagaslah sebuah organisasi pemuda tani dan pemuda adat bernama *Naposo Pature Bona (NPB)* sebagai wadah perjuangan untuk pemuda tani dan pemuda adat yang menetap di kampung. Organisasi harus dimaknai sebagai tempat belajar dan berkumpul untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sebab ucap Pramoedya Ananta Toer, 'didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan.'

Seperti organisasi kepemudaan yang terdahulu, NPB harus memiliki ideologi yang jelas, dan visi-misi yang tegas untuk kepentingan bersama seluruh anggotanya. Tidak hanya itu, melainkan harus menjadi ruang yang aman untuk berbagi pendapat, independen, dan semakin menumbuhkan kecintaan pemuda terhadap wilayah adatnya. Pemuda di Kawasan Danau Toba, ber-NPB lah!

**Romian Siagian** adalah staf di Divisi Studi & Advokasi KSPPM

# Masyarakat Adat Pandumaan-Sipitu Huta: Perjuangan Kami Belum Selesai

Tulus Sinambela

*(Pemuda Adat Pandumaan-Sipituhuta)*



**“Namaku Tulus Fransiskus Sinambela lahir pada tanggal 04 Oktober 1999 di desa Sipituhuta, Dusun II”.**

**S**aya ingin menceritakan pengalaman ketika orang tua saya sedang berjuang mempertahankan hak kami sebagai komunitas. Kisah ini dimulai pada tahun 2008-2021. Kala itu saya masih menginjakkan kaki di sekolah dasar kelas IV. Ayahku seorang petani Kemenyan yang menggantungkan hidupnya dari hutan Kemenyan yang sudah sejak lama dia kelola bahkan sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan merupakan warisan yang di tinggalkan oleh nenek moyang kami.

Ibuku seorang petani yang mengelola lahan persawahan dan kebun kopi milik kami sendiri. Awalnya kehidupan kami mencukupi meskipun sederhana. Hasil panen getah Kemenyaan yang di kelola ayahku bisa mencukupi biaya hidup dan juga bisa

menyekolahkan saudara saudariku. Namun semuanya berubah sejak kedatangan perusahaan merusak hutan kemenyan kami.

## **Bajingan itu bernama TPL**

Hal itu menyebabkan produksi pertanian menurun bahkan tak jarang gagal panen. Ini merupakan akibat dari gundulnya hutan hutan. Gundulnya hutan membuat serangan hama semakin masif, juga banjir.

Lahan persawahan menjadi sering terendam banjir, juga aliran sungai terkontaminasi oleh limbah perusahaan merusak lingkungan bajingan itu.

Kedatangan mereka secara tiba tiba tanpa ada negosiasi ataupun sosialisasi kepada kami. Jauh sebelum kedatangan TPL, hutan hutan kami dimasuki secara sembarangan oleh perusahaan PT INTI INDORAYON tetapi ayahku masih mampu mengusir mereka.

Perusahaan itu juga memberi ganti rugi atas kerusakan dan pencurian pohon alam yang tumbuh di hutan kemenyan kami, hal itu terjadi setelah ayahku berupaya melakukan pengancaman terhadap kontraktor yang berani mengambil sumber daya dari hutan Kemenyan kami. Tetapi setelah kedatangan PT TPL, ayahku tidak mampu melawan lagi, karna mereka sering melakukan pengancaman dan menakut nakuti ayahku dengan dalih pelanggaran hukum jika ayahku melakukan perlawanan.

Pada tahun 2008, seorang warga Pandumaan ingin mensertifikatkan tanahnya dekat hutan kemenyan, namun hal itu tidak disetujui oleh pihak BPN karena menurut mereka tanah itu berada dalam kawasan hutan produksi milik PT TPL, bahkan permukiman kami juga masuk dalam kawasan hutan produksi TPL.

Sejak itulah, perjuangan Pandumaan-Sipituhuta dimulai. Komunitas yang sebenarnya terdiri dari dua desa ini memutuskan bersatu menolak kehadiran TPL. Ayah dan ibuku ikut serta dalam perjuangan itu karena sejak awal hutan kami juga telah dihancurkan oleh perusahaan bajingan itu.

### Bersatunya perjuangan Pandumaan-Sipituhuta

Masyarakat Pandumaan Sipituhuta melakukan aksi massa pertama ke Kantor Bupati Humbang Hasundutan, namun penyampaian aspirasi tersebut tidak terjawab seolah pemerintah kabupaten tidak mau tau dengan hal itu.

Setelah aksi tersebut, masyarakat Pandumaan-Sipituhuta berkumpul untuk kembali menegaskan mereka akan berjuang bersama. Saat pertemuan itu seorang perempuan datang ke tempat pertemuan itu berlangsung, beliau berasal dari KSPPM yang kala itu posisinya sebagai staff advokasi.



Namun kedatangan beliau tidak disambut bahkan dicueki oleh masyarakat karena berpikir beliau adalah mata-mata. Tetapi beliau menawarkan untuk membantu perjuangan Pandumaan-Sipituhuta sampai tuntas. Hal itu tidak langsung ditanggapi baik oleh masyarakat namun tidak juga menolak kehadirannya.

Setelah beberapa kali pertemuan, dan setelah melakukan beberapa kali aksi massa ke pemerintah kabupaten yang sama sekali tidak membuahkan hasil, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta membentuk sebuah organisasi perjuangan dalam rangka memperkuat kesatuan, dan pada saat itu juga masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta melakukan sumpah untuk berjuang bersama dan tidak boleh berkhianat.

Sumpah itu dilakukan dengan melaksanakan ritual adat yaitu "*mangallang ate na nirusuk*" (memakan hati yang di tusuk dengan lidi) adapun isi sumpah itu adalah "*manang ise na marjehe manang manambil sian hasadaon, ikkon songon ate na ni rusuk on ma dihilala*" (barangsiapa yang berkhianat dari kesatuan maka dia akan merasakan seperti halnya hati yang di tusuk).

Setelah ritual itu selesai para tetua adat memilih pengurus perjuangan yaitu James Sinambela sebagai ketua perjuangan.

### Hari-hari yang mengancam

Berbagai macam cara dilakukan untuk menuntaskan persoalan yang dialami masyarakat adat pada saat itu, berbagai upaya dilakukan untuk menyampaikan keluhan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta.

Ada salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan pada saat itu (2009-2011). Pada saat itu TPL melakukan penebangan pohon kemenyan, salah satu Petani kemenyan melihat aktivitas itu dan kemudian segera memberitahukan kejadian itu ke pengurus perjuangan, dan segera mengutus puluhan *ama-ama naposo* (kaum laki laki muda), mereka ingin melakukan pemberhentian aktivitas dan pengusiran para pekerja TPL.

Sesaat setelah sampai di lokasi penebangan mereka langsung dihadang oleh satuan Brimob lengkap bersenjata dan melarang mereka untuk memasuki lokasi penebangan dengan alasan lahan itu bukan milik masyarakat adat melainkan milik perusahaan.

Kelompok utusan Masyarakat adat itu bernegosiasi agar Satuan Brimob itu tidak melarang mereka memasuki lokasi penebangan, namun mereka malah mendapat intimidasi dan pengancaman dari Brimob itu.

“Jangan sempat kalian melewati garis ini, jangan melakukan perlawanan, satu peluru satu nyawa, satu pukulan 5 juta” ujar salah seorang anggota Brimob. Hal ini memicu emosi yang tidak terkontrol dari masyarakat sehingga mereka melakukan pemukulan terhadap anggota brimob yang melakukan pengancaman itu, terjadilah bentrok antara masyarakat dan pihak pekerja TPL, dan satuan Brimob.

Masyarakat melakukan pembakaran alat berat serta perkemahan dan pembakaran gelondongan kayu yang telah di tebang. Peristiwa ini memicu konflik baru. Sejak saat itu, masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta mendapat teror, hampir setiap hari.

Pada masa itu polisi melakukan patroli untuk mencari masyarakat adat yang terlibat pada peristiwa itu. Saya sebagai penulis kisah ini pada saat itu masih berumur 10 tahun, ikut serta merasakan ketakutan.



Saya takut polisi akan menangkap abang dan ayah saya karena pada saat itu polisi membuat wacana bahwa semua laki-laki warga Pandumaan-Sipituhuta akan ditangkap. Abang saya merupakan salah satu orang yang ikut dalam kejadian itu, sedangkan ayah saya yang pada saat itu sudah berumur 65 tahun, tetapi tetap mendapat intimidasi.

Pada saat itu kelompok yang di buron polisi bersembunyi di hutan dan di perkebunan kopi milik warga. Saya benar benar merasakan kepedihan dan ketakutan dengan kejadian itu. Saya masih mengingat jelas peristiwa di mana saya bersama kakak saya yang pada saat itu berumur 15 tahun disuruh ibu mengantar makanan kepada mereka yang menjadi buronan pada malam hari sekitar pukul 11.00 menuju hutan tempat persembunyian para buronan.

Bayangkan seorang anak berusia 10 tahun harus terlibat konflik akibat keserakahan pemerintah dan perusahaan. Rasa takut yang selalu timbul, takut ayah dan abang saya ditangkap dan dipenjara.

Kaum ibu dan orang tua yang berumur 60-an tahun melakukan penjagaan ketat di persimpangan jalan masuk ke desa kami, ada 3 titik penjagaan pada masa itu. Titik 1 berlokasi di persimpangan jalan lintas Doloksanggul-Sidikalang dekat Mesjid Muttaqin.

Titik kedua Simpang 3 dusun II Dong-Dong dekat Gereja Katolik Santo Yohanes pembaptis Sipituhuta. Titik ketiga di perbatasan desa Pandumaan dan Aeknauli, hal itu dilakukan untuk melarang orang luar yang ingin memasuki desa kami. Pada saat penjagaan itu terjadi bentrok antara masyarakat dengan pihak kepolisian, mereka

menyebut bahwa masyarakat adat telah mengganggu jalur lalu lintas, pihak kepolisian kemudian mengintimidasi kaum perempuan yang sedang berjaga.

Ayah, ibu, dan abang saya ikut serta dalam peristiwa itu, dan pada saat itu juga ayah saya ditangkap polisi dan dibawa ke Polres Doloksanggul atas tuduhan merusak fasilitas umum. Ayahku yang pada saat itu berumur 65 tahun harus mengalami kriminalisasi, ayahku dijadikan tahanan luar atau tahanan wajib lapor selama 3 bulan.

Ibuku lah yang pada saat itu harus berjuang, dia pergi kesana-sini untuk menyampaikan aspirasi nya lewat aksi massa, audiensi, dan rapat-rapat komunitas.

Atas segala kondisi itu, selama berbulan-bulan aku dan kakak perempuanku harus berusaha sendiri memenuhi kebutuhan sekolah dan untuk makan sehari-hari. Kami mengambil alih pekerjaan orang tua kami.

Hal ini mendorong saya untuk terus mempertahankan, melindungi, dan mengelola hutan adat yang diwariskan kepada saya sebagai generasi muda, dan menjadi dorongan untuk melanjutkan perjuangan keluargaku, sampai kemerdekaan yang sesungguhnya itu terjawab.

### **Diakui, lalu apa?**

Setelah mendapatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan pada Tahun 2021. Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta merasa lega dan berbahagia karena keberadaan hutan adat (*Tombak*

*Haminjon*) telah mendapat pengakuan yang sah dari negara. Pengakuan tersebut sekaligus membebaskan kami dari kawasan TPL yang sebelumnya merambah dan merusak hutan adat yang pada umumnya merupakan sumber mata pencaharian dan identitas budaya bagi kami.

Sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur kami, pada 2022 kami mengadakan pesta syukuran dihadiri seluruh pihak dan rekan juang. Lantas, apakah perjuangan orang tua kami masa itu selesai pada pengakuan?

Tentu tidak. Di balik kebahagiaan kami, kesedihan juga masih dirasakan karena ulah TPL.

Mereka meninggalkan jejak buruk bagi hutan adat kami. Hutan adat kami sebagian besar menjadi lahan kritis yang berdampak buruk bagi banyak hal, salah satunya semakin tingginya potensi banjir, khususnya menysasar persawahan masyarakat adat. Butuh waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun agar lahan lahan kritis itu pulih kembali. Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu penghalang sulitnya masyarakat adat memulihkan lahan tersebut.

Atas dasar itu, Lembaga adat yang kemudian dibantu oleh KSPPM sepakat untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang dinaungi oleh Lembaga Adat Pandumaan Sipituhuta untuk bersama sama mengambil peran dalam upaya peningkatan ekonomi sekaligus memperbaiki lahan kritis kembali. Kelompok tersebut diantaranya kelompok Tani Mangula Sipituhuta dibentuk pada 15 Juni 2024.

Kelompok ini dibentuk untuk menyediakan bibit pohon dan bibit tanaman untuk

memenuhi kebutuhan pertanian serta penyedia bibit dalam rangka pemulihan lahan kritis, karna selama ini masyarakat mengakses bibit secara sembarangan dan lebih berpatokan dengan produk toko pertanian. Kelompok ini hadir untuk memfasilitasi bibit yang dibutuhkan masyarakat agar tidak ketergantungan dengan produk toko pertanian serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi tentang pengembangan pertanian.

Ada juga Kelompok Ina Maduma yang dibentuk pada 15 April 2024. Kelompok ini dikelola oleh kaum ibu/perempuan adat Pandumaan-Sipituhuta. Ina Maduma menjadi kelompok yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan agar generasi muda tidak bermigrasi ke daerah lain, dan kelompok ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat adat dan mengembangkan sumber daya alam yang tersedia di wilayah adat.

Kelompok ini juga dibentuk atas dasar keluhan kaum perempuan karena kesulitan mengakses atau menstabilkan perekonomian keluarga. Melalui kelompok ini kaum perempuan juga bertekad menghapuskan ketidakadilan gender, bahwa perempuan tidak lagi sekadar menyulut api agar tetap berasap.

Tak kalah dari kaum perempuan, para pemuda juga mengemukakan dirinya. Lewat pembentukan kelompok pemuda adat Naposo Pature Huta yang dibentuk pada 22 Oktober 2023. Kelompok pemuda ini dibentuk atas dasar keluhan pemuda yang tinggal di kampung, di antaranya; sulitnya mengakses lahan dan pengembangan ekonomi yang menyebabkan banyak pemuda memutuskan untuk merantau, pandangan orang tua yang menganggap pemuda tidak



bisa terlibat dalam budaya adat istiadat, hingga pembatasan kreativitas akibat orang tua yang terlalu mengekang pikiran.

Harapannya, pemuda bisa mematahkan pandangan buruk tentang pemuda, menjadi wadah diskusi pemuda tentang berbagai macam hal khususnya untuk mempertahankan tradisi warisan masyarakat adat Batak Toba, tentang pertanian, pemanfaatan sumber daya dan juga diharapkan sebagai generasi yang mampu meneruskan perjuangan orang tua.

Dalam upaya mengembalikan kelestarian hutan kami yang telah dihancurkan oleh PT TPL, kami melakukan penanaman pohon di wilayah sekitar 5 hektare lahan kritis. Penanaman pohon tersebut dilaksanakan sekaligus dalam rangka peringatan Hari Bumi Internasional 2023 lalu. Sekitar 750 batang pohon ditanam oleh Masyarakat adat Pandumaan-Sipituta sebagai awal untuk menangani hutan-hutan yang telah digunduli sebelumnya oleh TPL.

Selain itu, kami sadar bahwa mengembalikan hutan untuk menjadi sumber perekonomian masih membutuhkan puluhan tahun. Atas dasar itu, kami juga dibekali dengan berbagai macam pelatihan. Mulai dari pelatihan pengolahan minyak kemenyaan yang merupakan mata pencaharian terbesar masyarakat Pandumaan-Sipituhuta hingga pelatihan pengolahan bubuk kopi.

Setelah beberapa pelatihan tersebut, Masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta khususnya organisasi pemuda adat memulai melakukan praktik pengolahan minyak kemenyan sampai diolah menjadi parfum kemenyan. Namun, ada banyak kendala dalam mengelola atau mengembangkan

getah kemenyaan itu salah satunya biaya operasional yang tinggi dan target pasar yang sulit ditemukan.

Naposo Pature Huta dan Kelompok Tani Mangula Sipituhuta fokus mengembangkan pembibitan tanaman seperti kopi, kayu manis, tiung, dan lain sebagainya. Pembibitan ini dibuat untuk persediaan pemulihan lahan kritis hutan adat.

Kelompok Perempuan Ina Maduma melakukan pengolahan pasca-panen kopi. Mereka memilah setiap biji kopi terbaik. Kini, Kelompok Perempuan Adat Ina Maduma telah menghasilkan produk bubuk kopi pertama pada 5 September 2024. Dengan adanya bantuan mesin *roasting* kopi, mesin bubuk kopi, dan mesin kemasan yang mereka peroleh dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), mereka memulai produksi kopi dari swadaya biji kopi anggota masing-masing 1 kg.

Artinya, mereka memiliki modal awal sekitar 20 kg. Dalam produksi berikutnya mereka juga menggunakan swadaya dari biji kopi masing-masing anggota. Hasil penjualan mereka jadikan modal untuk produksi berikutnya.

Salah satu anggota dari Kelompok Perempuan Ina Maduma adalah Ibu Rusmedia Boru Lumban Gaol. Ia sebelumnya merasa khawatir, karena setelah mendapatkan SK pengakuan masyarakat adat, Komunitas Pandumaan-Sipituhuta seolah terbengkalai.

Namun, dengan adanya kelompok Ina Maduma ini, harapannya kembali tumbuh. Ia berharap kelompok ini jadi percontohan bagi warga lainnya, serta menjadi unit usaha yang

mampu menopang Pandumaan-Sipituhuta sebagai komunitas.

### Harapan dan kekhawatiran

Berbagai kegiatan di atas hanya langkah kecil berikutnya dari perjuangan kami Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta. Saya sadar bahwa perjuangan kami bukan sebatas untuk mendapat pengakuan saja. Pengakuan yang menurut saya adalah sebuah ketimpangan juga, bagaimana mungkin masyarakat adat harus mendapat pengakuan dari negara, sedangkan negara ada karena masyarakat adat bahkan dasar negara ini berdiri pun berasal dari adat, harusnya negara yang harus mendapat pengakuan dari masyarakat adat.

Karena itu juga perjuangan kami tidak akan pernah selesai, kami akan terus berjuang sampai negara ini benar-benar tunduk kepada rakyat bukan tunduk kepada kaum kapitalis seperti yang terjadi saat ini.

Dan ini akan menjadi dasar bagi saya untuk terus melakukan perlawanan mendapatkan hak yang berkeadilan. Terbitnya SK pengakuan masyarakat adat bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat adat bebas mengelola dan menempati wilayah adatnya. SK hanya surat administrasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai petunjuk. Tidak ada jaminan secara politik bahwa tanah kami aman dari perampasan negara untuk kebutuhan investor.

Dan hal ini menjadi kekhawatiran bagi saya. Bagaimana suatu saat nanti jika itu terjadi seperti apa nasib kaum rentan yang berada di kalangan masyarakat adat.

Karena di kalangan masyarakat adat pun sebagian ada kaum kapitalis yang adalah duri dalam daging bagi masyarakat adat. Ketimpangan adalah sebuah bentuk penjajahan, jauh sebelum peristiwa perjuangan pun ketimpangan itu sudah terjadi dan sampai saat ini masih terjadi juga di Pandumaan-Sipituhuta.

Salah satu bentuk ketimpangan di masyarakat adat yang paling umum adalah pemilikan tanah. Tidak semua masyarakat adat yang memiliki tanah sebagai landasan mereka untuk hidup, namun hal ini bukan tanpa sebab, banyak faktor penyebab hal ini terjadi.

Masyarakat adat Batak Toba memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari marga-marga yang merintis ataupun marga yang membuka perkampungan. Masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta menurut cerita para tetua memiliki perbedaan kedudukan.

Marga yang pertama membuka kampung dinamai Raja Bius. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tanah dan juga yang menguasai perkampungan, kemudian Raja Paradatan mereka adalah kelompok marga yang berperan sebagai pelaksana acara



acara adat, bisa disebut mereka adalah kelas menengah setelah raja bius jika dilihat dari segi kepemilikan tanah.

Boru bius adalah keturunan dari anak perempuan marga raja bius, mereka berperan sebagai pelayan dan penyedia keperluan kegiatan marga raja bius.

Terakhir, boru paradatan yang adalah marga-marga yang datang dan ikut serta ketika pembukaan kampung dengan peran sebagai penyedia alat ataupun keperluan upacara adat.

Ketimpangan biasanya terasa paling berat bagi marga boru paradatan karena mereka mendapat pembagian tanah yang paling sedikit – bahkan lebih sedikit dibanding boru bius.

Upaya untuk memperbaiki ketimpangan ini pun masih sulit diwujudkan. Manusia akan terus menerus mengalami ketimpangan ini jika ego dan keserakahan itu masih terus dipelihara oleh manusia itu sendiri. Upaya apapun itu tidak akan mampu mengatasi ketimpangan jika ego itu masih dipelihara.

Saya sendiri sebagai generasi penerus perjuangan Pandumaan Sipituhuta tidak ingin ada ketimpangan, bahkan saya menginginkan kebebasan dan pembagian hak dan kewajiban itu dilakukan setara.

Salah satu contoh upaya kami adalah kelompok perempuan Ina Maduma yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, secara lebih khusus mewujudkan keadilan ekonomi-politik.

Upaya-upaya lain akan kami sediakan agar setidaknya masyarakat adat tidak menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Saya berharap masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan makmur dengan tetap memegang teguh nilai-nilai baik leluhur dan keadilan.

Dan perjuangan kami tentu tidak selesai hanya sebatas pengakuan lewat kertas-kertas berisi aturan dari negara dan peta-peta. Perjuangan kami masih panjang untuk memastikan tanah leluhur kami bisa menghidupi kami dan generasi berikutnya seperti yang dilakukan oleh orang tua kami.

Kami akan melanjutkan perjuangan itu. Dan saya akan memastikan kepemilikan, pengelolaan, pemberdayaan, perlindungan wilayah adat kami terpenuhi tanpa harus diberi pertimbangan atau pun diakui lewat kertas. Karena warisan nenek moyang ku adalah hak ku.

Perjuangan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta tidak akan pernah berakhir.

**Tulus Sinambela** adalah Pemuda Adat Pandumaan-Sipituhuta

# Berita Sopo



## RUA KSPPM

Pada 22-24 Februari 2024, KSPPM melaksanakan Rapat Umum Anggota tahun 2024 yang dilaksanakan di Training Center KSPPM Parapat. RUA ini dilakukan setiap tahun dan diikuti oleh semua anggota badan pendiri dan staf KSPPM. Rapat ini dilakukan untuk membahas kinerja Lembaga selama tahun 2023 dan rencana program Lembaga tahun 2024. Sebelumnya juga dilakukan refleksi theologi yang dibawakan oleh **Pdt. Prof. Binsar Jonathan Pakpahan, Ph.D.**

Pdt. Binsar membawa diskusi tentang politik Indonesia terkini dan bagaimana gerakan masyarakat sipil harus menyikapinya. Ia menjelaskan bahwa fenomena populisme yang memenangkan Prabowo Subianto harus menjadi pelajaran bagi kaum terdidik termasuk organisir rakyat untuk bekerja lebih keras merebut ruang yang ada. Ruang yang selama ini, dan puncaknya pada pemilu lalu dikuasai oleh populisme, harus direbut guna memperjuangkan demokrasi substantif.

Pada rapat hari ketiga dilakukan pemilihan pergantian kepengurusan untuk periode 2024-2027, pengurus yang terpilih yaitu

- |             |  |
|-------------|--|
| Ketua       | : Indira Juditka Simbolon  |
| Wakil Ketua | : Dimpos Manalu  |
| Pj.Sekpel   | : Masro Delima Silalahi  |
| Bendahara   | : Pdt. Setia Ulina Tarigan   |
| Anggota     | : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pdt. Irvan Hutasoit</li> <li>- Pdt. Mardison Simanjong</li> <li>- Pdt. Darwita Hasiani Purba</li> </ul> |





### Pembongkaran Mitos untuk Gerakan Sosial yang Transformatif: Pendidikan Critical Agrarian Studies of Indonesia Chapter Sumatera Utara 2024

Secara garis besar, Pendidikan ini adalah pembongkaran mitos. Terlihat di akhir sesi, peserta yang adalah staf KSPPM dan beberapa mahasiswa merasa lega karena realitas yang dilihat di pedesaan benar-benar didekonstruksi. Hal-hal yang selama ini dirasakan di desa akhirnya menemukan penjabaran teoritiknyanya.

Pendidikan ini dilaksanakan di Sopo Training Center KSPPM, Parapat pada 12-15 Desember 2024. Pendidikan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Agrarian Resource Center (ARC), sebuah perkumpulan untuk produksi kajian agraria, yang berbasis di Bandung. Hadir sebagai narasumber, dua peneliti senior ARC; Dianto Bachriadi Ph.D, dan Hilma Safitri MA.

Kontekstual pendampingan KSPPM, maka materi pada CASI kali ini dipadatkan menjadi beberapa materi relevan. Di antaranya; kapitalisme, *land*

*grabbing* & ekstraktivisme, Proyek Strategis Nasional, Transisi Agraria & Transformasi Kaum Tani, Gerakan Sosial dan Kontekstualisasi Adat, dan terakhir Agroekologi.

Beberapa konsep didiskusikan berkaitan dengan konteks kerja KSPPM. Pada urusan Gerakan Masyarakat Adat, diskusi menjadi sangat menarik karena adanya perdebatan seberapa transformatif ia

untuk disebut sebagai gerakan sosial. Ia menjadi tidak transformatif jika berkuat pada urusan hak atas tanah. Karena dengan menempatkannya demikian, Gerakan Masyarakat adat cenderung tidak merubah apa-apa atau malah mengalami *decline* tatkala kepentingannya – hak atas tanah – telah diperoleh.

Gerakan akan menjadi transformatif ketika ia bisa membongkar secara jujur dan setara kondisi ekonomi-politik di pedesaan. Untuk itulah, pembahasan di hari terakhir soal





Agroekologi dikemas secara lebih aplikatif dengan mengajak para peserta untuk merumuskan konsep pertanian terencana yang akan dilakukan di komunitas dampingan KSPPM. Dengan kolektivisasi usaha pertanian, komunitas dampingan KSPPM akan terlepas dari cita-cita yang terbatas pada hak atas tanah, malah lebih luas lagi menciptakan sosialisme lokal sebagai tandingan ekonomi pasar yang melanggengkan relasi produksi kapitalis.

Pendidikan ini diharapkan benar-benar mampu diterjemahkan oleh para *organizer* demi Gerakan sosial yang transformatif dan terciptanya masyarakat baru. Ini juga penting mencegah kerja-kerja NGO dari perangkap kapitalisme global.

### Audit Eksternal

Secara rutin, setiap enam bulan KSPPM melakukan audit keuangan eksternal untuk memastikan KSPPM sebagai organisasi yang akuntabel dan transparan. Pada 26-31 Agustus 2024, Kantor Akuntan Publik (KAP) Hananta Budiarto Semarang melakukan audit tersebut. Selain memeriksa bukti-bukti transaksi dan aset di TC/Sopo KSPPM Parapat, auditor juga melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KSPPM di komunitas dampungannya. Kunjungan dan diskusi dilakukan di Komunitas Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Kec.Pollung Kab. Humbang Hasundutan. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Laporan Audit Keuangan KSPPM Wajar Tanpa Pengecualian.



# Mata Guru, Roha Sisean

## Orientasi KT Saoloan ke KT Tani Mulia tentang konsep Pertanian Selaras Alam

Angela Manihuruk

**P**ertanian Selaras Alam (PSA) merupakan unit kegiatan yang sudah digunakan petani dampingan KSPPM sejak lama. PSA bukan hanya untuk menanam dengan input kimia yang rendah tetapi membangun kesadaran akan merawat alam, menanam tanaman lokal serta membuat petani berdaulat atas pangan.

Pada Senin, 15 Juli 2024, Kelompok Tani Saoloan dari Huta Natinggir, Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, melakukan orientasi ke Kelompok Tani Mulia di Desa Siboro, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. KT Saoloan datang untuk belajar budidaya pertanian bawang merah dengan menggunakan konsep PSA. KT Saoloan merupakan kelompok tani yang memiliki kegiatan lahan bersama seluas 1 hektar, dan mereka rencananya akan menanam bawang merah di sebagian lahan perjuangannya.

Kegiatan orientasi ini dibuka dengan berbagi pengalaman dari KT Tani Mulia yang aktif dalam membuat praktek PSA seperti membuat kompos, PPA dan pembibitan. Parulian Siantur yang biasa dipanggil Ama Adi, merupakan kader organisasi petani sekaligus ketua dari KT Tani Mulia, sudah menerapkan PSA sejak tahun 2009. Ia yang dulunya berprofesi sebagai supir, perlahan-lahan belajar tentang pertanian dari para *natua-tua* di desa dan dari kelompok tani. Ia berbagi kisah proses pertanian mulai dari pengolahan lahan, pemilihan bibit,

penanaman, perawatan, pencegahan hama dan penyakit hingga panen.

### Pengolahan lahan

Ada dua jenis lahan yang digunakan untuk bawang yaitu lahan basah dan lahan kering. KT berencana menggunakan lahan kering. Sebelum mengolah lahan, petani harus mengetahui kualitas lahan yang dimiliki dengan pH (*potential of hydrogen*) tanah dengan alat ukur. Untuk mengukur pH tanah, harus diambil 5 titik dalam 1 lahan dan diambil ukuran rata-ratanya. Untuk menanam bawang yang baik, pH tanah harus di angka 6-7. Jika pH tanah belum sampai 6-7, maka ditaburkan dolomit selama 1 minggu lalu diukur kembali hingga angkanya naik ke 6-7. Jika angkanya sudah pas, maka tanah sudah bagus dan siap ditanam.



Selanjutnya tanah untuk menanam bawang digemburkan atau dicangkul secara keseluruhan. Kemudian tanah tersebut ditabur kompos seperti kotoran ternak dan dedaunan secukupnya. Setelah itu, tanah dibedengi dan disiram dengan PPA (Pupuk Pestisida Alami) dengan ukuran dalam 1 cangkir PPA ditambah 10 liter air lalu disiramkan ke bedengan yang telah diratakan tadi. Selain disiram, bisa juga disemprot dengan ukuran PPA 1 liter per 1 tangki semprot.

### Pemilihan Bibit

Terdapat beberapa jenis bawang yang umum dibudidayakan, di antaranya; bawang Nganjuk, Probolinggo, Brebes, Batu Ijo. Yang paling cocok di lokasi Tapanuli Raya atau kawasan danau toba adalah jenis Probolinggo, Brebes dan Nganjuk.

Untuk menjadi bibit, bawang yang dipilih harus berukuran sedang (jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil).

Setelah bibit dipilih dan dikumpulkan, bibit dibiarkan selama lebih kurang 2 bulan dengan cara digantung agar bawangnya cepat kering dan umbi bawangnya cepat tumbuh.

### Penanaman dan perawatan

Bibit yang sudah tumbuh umbinya tersebut, sebelum ditanam, terlebih dahulu bibit direndam dengan PPA (Pupuk Pestisida Alami) yang dibuat di dalam ember sekitar 1 menit agar PPA meresap kedalam bawang.

Setelah 1 menit bibit diangkat dan langsung ditanam dengan jarak 15cm x 15 cm atau 20 cm x 20 cm.





Setelah bibit berumur 2 minggu (setelah tumbuh), kemudian disemprot kembali dengan PPA dengan ukuran 1 Liter PPA per 1 Tangki (14 Liter air) agar merangsang pertumbuhan bagus dan mengurangi hama.

Seminggu kemudiannya ( 3 minggu setelah pasca penanaman), disemprot kembali dengan PPA dengan ukuran 1 Liter PPA per tangki (14 Liter Air).

Pada waktu maksimal 3 minggu masa awal tanam, kita harus membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran bawang. Diusahakan jangan sampai ada gulma atau rumput yang tumbuh. Berulang dilakukan sampai bawang tumbuh.

Diusahakan jangan sampai lewat umur bawang 1 bulan, bawang disemprot dengan PPA supaya tidak terjangkit penyakit.

### **Hama, penyakit, dan cara mengendalikannya**

Pada bawang, jenis hama yang ada yaitu penggerek daun dan ulat. Jenis penyakit yaitu Hawar Daun di mana daun bawang menguning yang diakibatkan jamur dan bakteri. Dan untuk dua masalah ini, terdapat masing-masing cara mengendalikannya.

Untuk hama ulat dengan insektisida Ludo dan Knuker (banyak jenisnya sesuai dengan kebutuhan).

Sementara untuk mengatasi penyakit Hawar Daun dapat digunakan Fungisida yang digunakan untuk membasmi jamur dan virus. Yang menjadi penting untuk dicatat, adalah petani harus rajin mengamati jenis hama dan jenis penyakit agar bisa segera diatasi.

Jika pemilihan bibit, penanaman, hingga perawatan berlangsung dengan baik, maka umur 2,5 bulan atau 70-75 hari sudah cukup bagi bawang untuk bisa dipanen.

Hal ini – menentukan bawang sudah bisa dipanen atau tidak – juga bisa dilihat dari daun bawang yang sudah jatuh (layu) maka bawang sudah siap dipanen.

Dalam proses pemanenan juga kita bisa menyeleksi bawang yang bisa digunakan untuk menjadi bibit dalam masa tanam selanjutnya. Caranya, bawang disisihkan kembali dari hasil panen dengan melihat ukuran sedang untuk bibit supaya ada yang dibibitkan kembali.

Sebelum melihat langsung lahan bawang, Ama Adi Sianturi menyampaikan kesannya dalam bertani menggunakan konsep PSA.

KT Saoloan tentu berharap apa yang mereka pelajari hari ini bisa mereka praktikkan di lahan mereka. Karena semua orang harus paham, bahwa petani harus berjuang dengan cara petani. Entah itu perjuangan hak atas tanah, atau perjuangan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih luas, perjuangan untuknya haruslah dengan mempraktikkannya secara langsung.

Utamanya di rezim pembangunanisme dengan tingkat eksploitasi alam dan manusia sangat tinggi, yang bisa dilakukan petani adalah melahirkan alternatifnya.

*“Keuntungan bertani selaras alam dengan menggunakan kompos dan PPA sangat banyak. Modal saya sangat terbantu karena tidak semua pupuk harus dibeli dan cara perawatan juga sangat terbantu dan lebih mudah hanya dengan 2 x proses pemberian pupuk PPA”* Ucap Ama Adi Sianturi menutup diskusi siang itu. \*\*\*

# Catatan Selama Mengikuti Pelatihan *Critical Agrarian Studies Of Indonesia (CASI)* di Bandung

Sandres Siahaan

**C**ritical Agrarian Studies of Indonesia (CASI) merupakan pelatihan yang diinisiasi oleh Agrarian Resources Center (ARC) Bandung. CASI telah dilaksanakan sebanyak 10 kali yang bertujuan untuk menyebarkan perspektif kritis agraria di Indonesia. ARC memiliki 3 standing positions diantaranya; mengisi kekosongan analisis kelas dalam bidang advokasi, studi dan kampanye; menjadi supporting system bagi Gerakan sosial; dan membumikan pemikiran kritis dan radikal.

Pelatihan CASI dilaksanakan selama 8 hari. 1 hari merupakan sesi kuliah umum untuk menyambut 1 dekade pelaksanaan CASI. Pembicara dalam kuliah umum ini adalah Saturnino M Borras dan Dianto Bachriadi.

## Hari 1 – Sesi Kuliah Umum

Borras menjadi pembicara pertama. Borras mengawali pemaparannya dengan penjelasan mengenai 3 sources of knowledge yaitu institusi academic, institusi penelitian independent non-academic dan gerakan sosial. Borras mengatakan bahwa Studi Agraria Kritis berguna untuk melihat perubahan di area pedesaan untuk menginterpretasi dunia dan mengubahnya – tetapi tidak secara netral – untuk keadilan yang lebih tinggi. SAK tidak mungkin ada tanpa adanya *classical agrarian question* yang mana AQ Classic lebih berpusat pada Marx. Namun, menurut Borras SAK lebih luas dari pada AQ Classic karena telah memasukkan unsur-unsur kontemporer seperti ekologi dan gender.

Borras juga memberi kritikan pada perjuangan agraria hari ini yang sangat sektoral dan lokalistik. Dia mengatakan bahwa bisa saja kondisi sedemikian merupakan *by setting* oleh pengaruh dari kerja-kerja NGO semakin banyak mengerjakan isu yang beragam sehingga mengakibatkan terjadinya fragmentasi isu dan memudahkan esensi dari perjuangan agraria yang seharusnya terlibat secara politis, pluralis dan internasionalis.

Dianto Bachriadi sebagai pembicara berikutnya membuka pemaparannya dengan mengutip Soekarno yang mengatakan bahwa “Gerakan petani hadir tidak untuk melayani kepentingan individu, tetapi untuk menciptakan bangsa yang lebih luas”. Setelah itu Dianto menjelaskan beberapa data statistik yang menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga petani di Indonesia sejak tahun 80-an dan data mengenai 80% petani yang sumber pendapatannya tidak lagi dari sektor pertanian. Data ini penting untuk mendudukan posisi kaum tani hari ini. Berdasarkan asumsinya, jumlah petani yang meninggalkan sektor pertanian akan terserap ke sektor industri.

Tetapi hal ini juga keliru karena menurut data statistik, sektor industri mengalami stagnansi serapan tenaga kerja (berkisar 14%). Pertanyaannya adalah, ke mana tenaga kerja pertanian itu terserap? Menurut data BPS, dalam 10 tahun belakangan telah terjadi peningkatan serapan tenaga kerja ke sektor informal. Artinya petani yang terusir dari tanahnya dan yang tidak mampu untuk

melanjutkan usaha tani, kini sudah bertransformasi menjadi pekerja informal yang posisinya cukup rentan tanpa adanya jaminan sosial dan upah minimum. Kondisi demikian dipertahankan hingga saat ini dimana desa merupakan tempat untuk penyedia cadangan tenaga kerja (*reserve army labour*) bagi industri dan juga menjadi tempat untuk menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor industri.

Ketimpangan agraria merupakan salah satu basis dari ketimpangan pendapatan. Sejumlah kecenderungan baru yang perlu diperhatikan adalah Indonesia merupakan ladang industri ekstraktif, Proyek Strategis Nasional yang merupakan proyek akumulasi kapital dimana pemerintah terlibat aktif untuk percepatan akumulasi kapital, dan proses proletarisasi yang lebih massif – hal ini bisa dilihat dari banyaknya *precariat class* (tenaga kerja terlunta).

Selanjutnya Dianto mengatakan bahwa *Political Economy* merupakan pondasi dari studi agrarian kritis. Tidak sedikit SAK yang menghilangkan perspektif kelas. Karenanya, meletakkan pondasi Analisa kelas menjadi penting dalam SAK. Sementara itu, untuk menutup sesi ini, Borras mengatakan “*all the working class have the agrarian question*”. Artinya, masalah agraria bukan hanya persoalan petani saja. Tetapi persoalan seluruh kelas pekerja yang ada di desa maupun di kota. Masalah agraria akan mempengaruhi kondisi ekonomi politik secara makro.

## **Hari 2 – Agraria , Kajian Agraria dan Ekonomi-Politik Agraria (Hilma Safitri)**

Materi dimulai dengan memperkenalkan Studi Agraria Kritis kepada peserta. Hilma menyampaikan bahwa ada 3 hal yang sering

mencuat dalam SAK yaitu masalah/fenomena agrarian, Solusi yang tersedia dan pertanyaan kritis atas solusi tersebut.

Agraria memiliki banyak pengertian diantaranya ada yang menyangkut aspek kebendaan, yakni objek material yang terlihat seperti tanah , pasir, bebatuan, air, mineral, pohon, hewan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa literatur, sejumlah peneliti sering mengistilahkan benda-benda material ini sebagai sumber-sumber agraria atau sumber daya agraria dan sumber daya alam. Aspek berikutnya menggunakan pendekatan relasi social. Artinya agrarian tidak hanya menyangkut aspek kebendaan tetapi juga relasi sosial yang terbentuk di atasnya akibat dari adanya relasi kuasa.

Dalam SAK, pendekatan ekopol diperlukan untuk melihat aspek agensi, struktur agraria dan kelembagaan. Hal ini pada akhirnya akan membentuk kelas-kelas sosial berdasarkan penguasaan lahan dan division of labour. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya dengan memakai perspektif SAK adalah mengenai siapa pemilik, penguasa dan pemanfaat tanah.

## **Hari 3 – Transisi Agraria dan Peralihan Corak Produksi (Syafiq)**

Materi ini membahas mengenai transisi agraria sebagai unsur penting dalam peralihan corak produksi. Dalam Ekopol Agraria Marxis, transisi agraria dimulai dari fase *pra kapitalis*. Konsepsi ini digunakan karena banyaknya bentuk corak produksi pra kapitalis seperti feodal dan pra feodal yang pernah eksis dalam perkembangan masyarakat. Transisi agraria bisa diartikan sebagai suatu proses peralihan corak produksi yang berkaitan dengan penguasaan

tanah dan tenaga kerja yang terjadi di pedesaan atau sektor pertanian yang menjadi tumpuan dan titik tolak dari perubahan satu corak produksi ke corak produksi lain khususnya dari corak produksi pra kapitalis ke corak produksi kapitalis ataupun pasca kapitalis.

Menurut Henry Bernstein dan Terry Byres, ada beberapa pertanyaan penting yang menyangkut transisi agraria yaitu ;

1. Transisi dari apa kemana?
2. Dimana, kapan dan berapa lama transisi berlangsung?
3. Bagaimana dan kapan terjadi?
4. Kapan transisi selesai?

Dalam Sejarah perkembangan kapitalisme di Inggris, transisi agraria dimulai dari *akumulasi primitif* yang bisa diartikan sebagai dinamika dan relasi-relasi non pasar atau paksaan ekstra ekonomi yang mengakibatkan petani terusir dari tanahnya. Untuk transisi di Inggris, perampasan tanah petani terjadi karena pembuatan kebijakan yang menghilangkan kepemilikan kolektif tanah.

Selanjutnya Syafiq menjelaskan bahwa akumulasi primitif di Inggris menyelesaikan AQ politik, akumulasi dan produksi sehingga bisa bertransisi ke corak produksi kapitalis yang cukup sempurna. Menurut Byres, jika AQ tidak selesai, maka akan terjadi "backwardness" atau keterbelakangan. Ada 3 konsep kunci dalam mempelajari transisi agraria yaitu penguasaan tanah, pengerahan tenaga kerja dan mekanisme penarikan surplus.

Selanjutnya, Syafiq menjelaskan mengenai Agrarian Question 1 tentang politik, Agraria Question 2 tentang Produksi dan Agraria Question 3 tentang Akumulasi.

### 1. Agrarian Question of Politics

Berawal dari pertanyaan "apakah kaum tani bisa diajak untuk tujuan revolusi"? Kaum Marxis mengatakan bahwa petani tidak revolusioner karena memiliki watak ganda sebagai pemilik alat produksi dan pekerja (apabila kerja produksi tidak cukup untuk kebutuhan subsistensi). Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan tentang "bagaimana memperlakukan kaum tani?". Engels menyarankan untuk melibatkan kaum tani dalam perjuangan revolusi karena jumlahnya tidak bisa diabaikan. Sementara itu Karl Kautsky menyarankan agar petani diabaikan karena pada akhirnya mereka akan terserap menjadi tenaga kerja di industri. Kautsky juga mengatakan bahwa petani akan sendirinya hilang karena penemuan teknologi baru.

### 2. Agrarian Question of Production

AQ 2 memunculkan pertanyaan mengenai "sejauh mana kapitalisme berhasil membentuk relasi produksi baru dan menghancurkan relasi produksi lama di pedesaan? – pembentukan tenaga kerja upahan. Yang menjadi objek pengamatan disini adalah pertanian keluarga di Rusia mengenai aspek penguasaan lahan dan tenaga kerja dan pertanyaan tentang kenapa masih ada petani keluarga di tengah gempuran kapitalisme?"

### 3. Agrarian Question of Accumulation

AQ 3 memunculkan pertanyaan "bagaimana kapitalisme bisa berkembang melalui industri yang bersumber dari surplus pertanian"? kenapa harus pertanian? Karena jumlah petani sangat banyak dan susah untuk diabaikan. Artinya petani sebagai cadangan tenaga kerja untuk industri dan juga

penghasil pangan murah untuk pekerja di kota.

Mempelajari transisi agraria cukup penting untuk merumuskan arah perjuangan. Reforma agraria juga merupakan program yang digunakan untuk mempercepat proses transisi menuju capitalism atau pasca kapitalisme atau sosialisme.

### Sesi 3 – Transformasi Kaum Tani (Pandu Sujiwo)

Pandu Sujiwo memantik diskusi dengan memunculkan headline berita yang mengatakan bahwa “per menit, satu rumah tangga petani menghilang”. Kemudian ada juga poster yang dirilis oleh KPA yang memuat tulisan “ per menit satu rumah tangga petani mundur” dan “per menit 0,25 lahan pertanian musnah” .

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah “petani” mana yang dimaksud? Mundur diri dan menghilang kemana dan menjadi apa? Lahan pertanian musnah? Apa maksudnya?, apa yang mengakibatkan petani mundur diri dan menghilang? Mengapa ini menjadi masalah?

Kemudian, Pandu mengatakan bahwa selama ini kebanyakan desa dipandang sebagai tempat dimana masyarakat hidup harmonis, guyub dan damai. Selain itu, banyak juga Gerakan sosial yang menempatkan petani sebagai sebuah entitas yang homogen dan memegang teguh kebersamaan. Pada kenyataannya, hal yang sedemikian merupakan mitos yang dilanggengkan untuk menutupi dan melanggengkan pelbagai ketimpangan dan penindasan yang terjadi di desa. Realitanya, kehidupan masyarakat desa senantiasa

dipenuhi dengan konflik dan ketegangan sosial yang disebabkan berbagai hal termasuk perbedaan kelas yang didasari pada hubungan yang eksploitatif. Bentuknya merupakan kompetisi, penyakapan, pengupahan dan eksploitasi diri.

Siapa itu kaum tani (peasantry) merupakan pertanyaan yang masih menimbulkan berbagai perdebatan hingga saat ini. Dalam bahasa inggris, terdapat berbagai istilah dan konsep untuk merujuk kaum tani yang seringkali membuat kita kebingungan seperti peasant, farmer, cultivator, smallholder, dan agriculture worker. Perdebatan mengenai hal ini bisa ditelisik lebih jauh sejak perdebatan antara kaum Chayanovian (neo populis) dan kaum Marxis.

Menurut konsep petani ala Chayanovian, kapital bukanlah relasi produksi tetapi barang yang ingin digunakan dalam aktivitas produksi. Chayanov juga mengatakan bahwa produksi petani tidak berorientasi profit. Analisis ini berangkat dari pengamatan Chayanov atas pertanian keluarga di Rusia serta Analisa data statistic makro sepanjang tahun 1882 hingga 1911. Dia mengatakan bahwa saat itu watak rumah tangga petani tidak terpengaruh oleh hukum ekonomi dan ekonomi petani memiliki logikanya sendiri. Pada smallholder tidak terdapat relasi buruh upahan. Chayanov juga mengatakan bahwa ada 5 hal yang diperlukan oleh corak produksi kapitalis yang akan runtuh apabila salah satunya tidak kokoh diantaranya adalah harga, kapital, upah, bunga, dan sewa. Oleh karena relasi upah tidak ada – petani hanya menggunakan tenaga kerja keluarga – maka tidak ada upah, harga, bunga, sewa dan kapital. Oleh karena itu, ekonomi petani memiliki logika yang unik dan memakai rasio antara *labour dan consumer*. Artinya, apabila rasio pekerja dan konsumen

seimbang, maka pekerja tidak perlu untuk bekerja melebihi kebutuhan reproduksi sederhananya. Sebaliknya, apabila jumlah konsumen lebih banyak dari pekerja, maka pekerja perlu menambah waktu kerja dan apabila ada faktor lain yang mengakibatkan produksi mereka terganggu seperti bencana dan perang, maka petani akan melakukan *self exploitation*.

Tak bisa dipungkiri bahwa Chayanov memberikan sumbangan yang berharga bagi perdebatan agrarian. Namun, teori Chayanov memiliki kelemahan dimana teorinya sangat statis dan terbatas pada kondisi tertentu juga tidak membayangkan hal-hal lain seperti faktor eksternal yang bisa merubah watak petani itu. Perlu digaris bawahi bahwa subsistensi petani yang dibayangkan Chayanov memerlukan berbagai prasyarat yaitu tanah yang masih luas, apa yang dikonsumsi masih diproduksi sendiri dan belum ada tekanan pasar. Sementara itu, kaum Marxis melihat kaum tani memiliki watak ganda yaitu *petty bourgeois* sekaligus *proletar*. Marx dalam Brumaire XVII Louis Bonaparte mengatakan bahwa petani seperti “kentang dalam karung” yang arahnya ditentukan oleh si pembawa karung – otoritas di atasnya. Mereka tidak bisa merepresentasikan dirinya sendiri, mereka harus direpresentasikan. Dalam corak produksi feodal, petani merupakan surplus producer sementara kaum bangsawan merupakan surplus taker. Pengambilan surplus berlangsung melalui mekanisme non ekonomi (melalui control dominasi politik dan sosial). Seiring dengan perkembangan kapitalisme, produksi pertanian dan kaum tani diinkorporasi menjadi bagian integral dari ekonomi kapitalis lewat akumulasi primitif yang mengubah kaum tani (peasant) menjadi buruh tani (agricultural/farm worker) dan

*petty commodity producers* (PCP). Sementara petani yang berhasil memanfaatkan proses akumulasi kapital dapat berkembang menjadi petani kapitalis (capitalist farmer). Hal inilah yang dikatakan dengan diferensiasi kelas. Akhirnya petani akan menghilang dengan sendirinya secara perlahan yang variasi dan kecepatannya bergantung pada kondisi local.

Bertahannya kaum tani dalam kapitalisme diakibatkan karena corak produksi kapitalis masih memerlukan kaum tani dan pertanian skala kecilnya sebagai 'production sites of labour-power' yang nantinya akan menjadi penyedia tenaga kerja murah untuk industri sekaligus menyerap tenaga kerja yang berlebih di industri akibat PHK untuk kembali ke desa dan bekerja di sektor pertanian.

Kapital bukanlah benda, tetapi bentuk hubungan sosial produksi antara pemilik dan pekerja dalam rangka menghasilkan nilai lebih yang terakumulasi. Menurut Bernstein, kapitalisme ditandai oleh 3 hal yaitu tenaga kerja sebagai komoditas, produksi komoditas yang meluas dan keharusan akumulasi. Akibat dari komodifikasi elemen-elemen untuk kebutuhan reproduksi memaksa petani untuk memproduksi komoditas yang dapat dipertukarkan di pasar atau menjual tenaga kerjanya. Tekanan pasar akan mengakibatkan petani mengalami “*simple reproduction squeeze*” (tekanan subsistensi). Dengan komodifikasi, petani tidak lagi memproduksi untuk menghasilkan nilai guna tetapi harus terlibat dalam pertukaran komoditas dan dengan itu petani akan terhubung ke kapitalis dan berada dalam relasi produksi komoditas kapitalis. Beberapa hal yang dapat mendorong proses komodifikasi adalah penetapan sistem pajak, menjadi buruh dalam proyek infrastruktur, menjadi buruh di Perkebunan, tanam paksa

tanaman komoditas dan introduksi alat-alat produksi pertanian yang harus dibeli (seperti pupuk, bibit, racun, peralatan, dll). Dengan komodifikasi subsistensi, '*peasant*' akan bertransformasi menjadi '*petty commodity producers*'. Untuk itu, akan sulit bagi kita saat ini untuk menemukan petani yang masih memiliki watak subsistensi tersebut.

#### **Hari 4 – Reforma Agraria Dalam Konteks Transisi Agraria dan Peralihan Corak Produksi (Dianto Bachriadi)**

Pada slide power point, Dianto memunculkan pertanyaan kritis tentang reforma agraria diantaranya :

1. Apa dan untuk apa reforma agraria? Apakah untuk keadilan akibat struktur agraria yang timpang? Apakah karena banyak tunakisma dan petani gurem? Atau untuk mengatasi kemiskinan?
2. Jika keadilan dan kemiskinan bisa diatasi tidak dengan menjalankan RA, apakah RA masih diperlukan?

Reforma Agraria merupakan program yang dianggap dapat menyelesaikan dua masalah agraria sekaligus yaitu konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah. Beberapa ahli mengatakan bahwa Reforma Agraria merupakan ultimate solution. Namun ada beberapa kritik terhadap reforma agraria yang dipandang sedemikian karena ada jalan lain atau ada konteks dan karakter dari pelaksanaan RA yang jika tidak dipenuhi maka program itu akan menjadi omong kosong. Dianto mengatakan bahwa tujuan awal RA adalah untuk merombak struktur agraria tapi bukan hanya itu karena masih ada tujuan yang lain.

Apa yang harus dilakukan RA adalah perombakan struktur agraria yang timpang

dan mendistribusikan tanah kepada orang yang mau menggarap tanah dengan serius. Reforma agraria juga harus dilakukan dengan mekanisme distribusi dan redistribusi. Mendistribusikan tanah negara yang kelebihan dan meredistribusi tanah yang dikuasai oleh Perusahaan swasta dan individu pemilik tanah luas. Setelah itu perlu dilakukan pembatasan penguasaan tanah. Maka, reforma agraria seharusnya dilakukan dengan cepat dan membentuk panitia ad hoc (10-15 tahun) karena RA bukanlah program rutin dan berkelanjutan. Penataan penguasaan tanah (tenure reform) harus disertai dengan paket pengembangan usaha tani yang dikelola bersama melalui koperasi atau KUB. RA juga memerlukan pengawalan ketat dari Angkatan bersenjata untuk menghindari perlawanan dari tuan tanah karena RA merupakan program yang harus memaksa (force). Maka, penyelesaian konflik agraria belum dapat dikatakan sebagai reforma agraria.

Reforma agraria harus ditempatkan dalam konteks transisi agraria. Seperti halnya beberapa negara di Amerika Latin, Jepang dan Korea memakai program reforma agraria untuk mempercepat proses transisi dari pra kapitalis menuju kapitalis. RA ditujukan untuk meningkatkan surplus pertanian agar lebih cepat menciptakan kondisi (akumulasi) yang diperlukan untuk perkembangan kapitalisme/sosialisme, melalui perubahan relasi produksi di sektor pertanian (penguasaan tanah dan penerahan tenaga kerja) yang disesuaikan dengan tujuan perubahan formasi sosial secara keseluruhan.

Pengorganisasian Gerakan untuk reforma agraria bergantung pada tiga pertanyaan berikut :

1. Apakah RA ditujukan untuk

memperkuat/mempercepat transisi kapitalisme melalui perluasan dan perbesaran akumulasi kapital di sektor pertanian?

2. Apakah RA ditujukan untuk memperluas sirkuit kapital atau membentuk sirkuit-sirkuit kapital baru di pedesaan?
3. Apakah RA ditujukan untuk memperkuat/mempercepat transisi sosialisme?

Menurut Dianto, tanpa suatu jawaban yang jelas atas ketiga pertanyaan ini, Gerakan

RA hanya akan menjadi Gerakan tanpa pedoman (reactive/reformative movement), tidak transformative dan mudah dikooptasi dan dibelokkan oleh berbagai kepentingan termasuk kekuatan-kekuatan kontra (counter forces).

### Hari 5 – Kapitalisme dan Neoliberalisme (Rizky M Hakim)

Pada sesi ini Rizki memulai materinya dengan melakukan tracking dari sejarah evolusi manusia. Uang merupakan alat tukar. Sebelum uang ditetapkan menjadi alat tukar, manusia menggunakan berbagai cara dan medium untuk melakukan pertukaran barang. Dimulai dari penggunaan besi, perak dan emas. Hubungan jual beli dan pertukaran komoditas sebenarnya sudah eksis sejak zaman pra kapitalis. Alat tukar juga merupakan medium untuk penyimpanan nilai kerja. uang ditemukan ketika pertukaran barang sudah tidak menggunakan emas. Dalam perkembangannya, uang juga berubah menjadi komoditas.

Pada abad ke 13, fenomena common land

diprivatisasi dan dirampas oleh kaum bangsawan feodal dan menjadikan rakyat bekerja diatas tanah tersebut dengan memberikan upah. Hal ini dikenal dengan peristiwa enclosure (pemagaran). Dasar penciptaan uang ditentukan dari seberapa banyak emas yang dipunya.

Hal yang dibutuhkan manusia untuk bisa bertahan hidup (survive) adalah makanan. Untuk mendapatkan makanan manusia harus bekerja. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang bisa bertahan hidup tanpa bekerja, maka dia telah melawan hukum alam. Hal ini sudah eksis sejak zaman perbudakan dan feodalisme, dimana rakyat bekerja untuk menghasilkan surplus dan diberikan kepada kaum bangsawan atau tuan budak.

Selanjutnya Rizki menjelaskan tentang sirkulasi capital oleh Marx. Sirkulasi capital digambarkan seperti ini :  $M - C (LP + MP) - C' - M'$ .

M : Uang (Money)

C : Commodity (Labour Power + Means of Production)

C' : Commodity tingkat lanjut setelah pencurahan tenaga kerja

M' : More Money (keuntungan yang didapat dari pertukaran komoditas di pasar)

Kapitalisme bekerja lewat proses akumulasi tanpa henti dan penarikan surplus oleh kapitalis terhadap kerja buruh. Kapitalisme juga mempunyai krisis di internalnya sendiri. Krisis tersebut adalah krisis *over akumulasi* dimana rate of profit yang dihasilkan melalui proses produksi tidak dapat dialirkan menjadi kapital baru. Hal ini juga akan menyebabkan Surplus value tidak dapat mengalir (over modal) dan tenaga kerja tidak terserap (over tenaga kerja). Krisis ini terjadi akibat underconsumption dan



underproductions dan adanya siklus 10 tahunan industri modern.

Neoliberal merupakan perkembangan dari kapitalisme akibat krisis yang dialaminya sendiri seperti krisis great depression tahun 1930 -an. Hal ini terjadi akibat kegagalan pasar (market failure) karena liberalisme ekonomi menolak adanya intervensi pemerintah dalam urusan pasar. Setelah itu, pada tahun 50-an keyness muncul dengan gagasan bahwa pasar tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri, artinya pemerintah harus melakukan intervensi terhadapnya. Namun akibatnya, banyak korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi karena negara ikut campur dalam proses akumulasi capital (state failure). Tahun 1980-an Von Hayek kembali menghidupkan konsep pasar bebas Adam Smith yang menolak intervensi negara di dalamnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan neoliberalisme dengan mantra privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Tugas negara hanya memastikan supaya pasar berjalan dengan efektif dengan membebaskannya.

### **Hari 6 – Ekstraktivisme Dalam Akumulasi Kapital (Ratu Tammi)**

Ekstraktivisme merupakan moda akumulasi dengan cara mengeruk sumber daya alam baik secara langsung atau melalui tanaman yang dibudidayakan dalam jumlah banyak dan intensif yang biasanya merupakan bahan mentah untuk diekspor. Ekstraktivisme tidak terbatas pada mineral atau minyak bumi, juga bisa terdapat di pertanian, kehutanan, dan bahkan perikanan. Pada intinya, ekstraktivisme tetap mempertahankan dan menjadikan suatu negara menjadi penghasil bahan baku mentah dan setengah mentah untuk kemudian diekspor untuk diolah pada industri lanjutan.

Kondisi sedemikian mengakibatkan surplus dari industri tidak dialirkan ke negara asal untuk membangun industri yang lebih maju dan menciptakan sirkuit baru. Kondisi ini juga menghambat kemajuan proses industrialisasi di negara asal karena tidak adanya transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

### **Hari 7 – Dari Gerakan Tani ke Gerakan Sosial Pedesaan (Rizki Maulana Hakim)**

Pada materi ini, Rizki mengatakan bahwa sangat penting untuk mendudukkan kaum tani sebelum berbicara Gerakan tani seperti halnya perdebatan tentang political agrarian question. Rizki mengatakan bahwa sosial movement berbeda dengan aksi protes/demonstrasi. Banyak hal yang mempengaruhi kemunculan aksi-aksi protes dan perlawanan kaum tani seperti terancamnya subsistensi petani, proses penghapusan hak masyarakat asli, kalkulasi untung rugi, dll. Jadi, watak revolusioner kaum tani tidak muncul dengan sendirinya.

Rizki juga menjelaskan tentang 3 perspektif yang biasa dipakai untuk melihat mana kaum tani yang paling revolusioner. Pertama, perspektif moral ekonomi adalah kaum tani yang jaminan subsistensinya terancam (berkurang atau hilang). Kedua, kalkulasi untung rugi adalah petani yang memiliki kepekaan dan kecerdasan untuk mengkalkulasi untung/ruginya jika terlibat dalam Gerakan revolusioner. Ketiga, konflik kelas adalah petani gurem dan landless yang terikat dan tereksplorasi dalam corak produksi pedesaan.

### **Hari 8 – Gerakan Sosial Pasca 65 (Dianto Bachriadi)**

Pada materi ini, Dianto menjelaskan mengenai Gerakan sosial pasca 65 yang

sangat terfragmentasi oleh berbagai isu, reaksioner, bergantung pada funding dan cenderung donor driven. Gerakan lingkungan juga hari ini tidak menempatkan kapitalisme sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan.

Pasca 65, bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi Gerakan sosial yang radikal yang memiliki tujuan politis untuk bergerak dari tatanan sosial satu ke tatanan sosial yang dicita-citakan padahal pasca 98 pendidikan politik semakin gencar dilakukan. Gerakan sosial selalu memiliki makna politis.

Faktor penyebab munculnya Gerakan sosial dan aksi protes diantaranya adalah

1. Penderitaan kolektif
2. Tidak berfungsinya sub system dalam kegiatan masyarakat
3. Kesadaran kelas, khususnya kaum tertindas
4. Kesadaran kolektif kelompok marginal atau kelompok masyarakat yang disingkirkan/dikucilkan/diabaikan (excluded people)
5. Pertukaran kepentingan dari pelaku-pelaku Gerakan (teori bachriadi)

Pada materi ini, Bachriadi menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitiannya yang dituliskan dalam disertasinya "Between Discourse and Action: Agrarian Reform and Rural Social Movement in Indonesia Post – 1965". Menurut Dianto, Gerakan sosial terjadi hanya apabila terjadi pertukaran kepentingan antara outsider dan petani. Ada dua kelompok aktor pokok dalam Gerakan sosial pedesaan di Indonesia. Pertama kelompok aktivis terdidik perkotaan (urban educated activist group) yang merupakan kelas menengah perkotaan. Kedua, kelompok masyarakat tergusur, tersingkir atau termarginalkan akibat pembangunanisme.

Berikut adalah 5 proposisi Gerakan sosial pedesaan dan Gerakan lingkungan pasca 65 (Bachriadi):

1. Transmutasi organisasi Gerakan tengah dan terus berlangsung (dikendalikan oleh dan pada gilirannya sekaligus menghasilkan *mutant-activists*)
2. Pertukaran kepentingan di antara aktor utama (*exchange of interest among the main actors*)
3. Saling menunggangi antara aktor-aktor pedesaan yang berkepentingan dengan tanah dan lingkungan hidup lokal dengan aktivis terdidik perkotaan
4. Gerakan sosial pedesaan dan Gerakan lingkungan semakin nir-ideologi radikal dan secara pragmatis lebih dijadikan wahana untuk menaiki tangga politik dan sarana untuk pemenuhan kepentingan ekonomi para aktivis, khususnya aktivis terdidik perkotaan (ideologi bukan elemen yang penting dalam Gerakan sosial pedesaan, melainkan pragmatisme politik dan ekonomi)
5. Kemiskinan ideologi radikal, reformasi dan demokratisasi (:demokrasi liberal) yang berlangsung setelah 1998 membuat Gerakan sosial pedesaan makin jauh dari gagasan -gagasan perubahan social yang transformatif dan goals displacement menjadi kecenderungan yang dibiarkan bahkan dinikmati (: Gerakan sosial semakin jauh dari sikap kritis-reflektif)

**Sandres Siahaan** adalah staf di Divisi Pengorganisasian KSPPM